

INDEKS HIRARKI WILAYAH BERDASARKAN FASILITAS PELAYANAN DI KABUPATEN BANJAR

HIERARCHY REGION INDEX BASED ON SERVICE FACILITIES IN BANJAR DISTRICT

Dewi Siska

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia
e-mail: siskadarsono@yahoo.com

Diserahkan : 15/10/2019, Diperbaiki : 01/11/2019 , Disetujui : 01/12/2019

Abstrak

Pengembangan wilayah diarahkan sebagai solusi dari ketimpangan antar wilayah sebagai akibat dari ketidakmerataan pembangunan. Melakukan pengoptimalan fasilitas pelayanan merupakan salah satu upaya mengatasi ketidakmerataan pembangunan tersebut dengan menentukan hirarki wilayah. Tujuan dari penelitian ini, yaitu menentukan hirarki wilayah pada 19 kecamatan di Kabupaten Banjar berdasarkan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan analisis skalogram. Hasil penelitian menunjukkan indeks tertinggi atau hirarki I terdapat pada satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Martapura dengan indeks 83,09, sedangkan 18 kecamatan lainnya berada pada hirarki III dengan indeks terendah 0,00 yaitu Kecamatan Paramasan. Rekomendasi kebijakan dengan menyusun perencanaan pembangunan wilayah yang lebih fokus pada pemenuhan fasilitas pelayanan di kecamatan dengan hirarki III.

Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi Wilayah, Skalogram, Hirarki

Abstract

Regional development is directed as a solution disparities as a result of inequality in development. Optimizing service facilities is an effort to overcome inequality in development by determining the regional hierarchy. The purpose of this research is to determine the regional hierarchy in 19 districts in Banjar regency based on social and economic service facilities owned. This research uses a descriptive method with a quantitative approach based on a scalogram analysis. The results showed the highest index or hierarchy I was found in one district only, Martapura District with an index of 83.09, while 18 other districts were in the hierarchy III with the lowest index of 0.00, is Paramasan District. Policy recommendations by preparing regional development plans that are more focused on meeting service facilities in the third hierarchy.

Keywords: Regional economic development, Scalogram analysis, Hierarchy

PENDAHULUAN

Pemerataan wilayah pembangunan khususnya pembangunan daerah merupakan kebijakan penting sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan lainnya dari pembangunan daerah adalah terwujudnya kemandirian dan kemajuan

daerah yang merata. Dalam UU 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah mengisyaratkan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis pengembangan wilayah dibanding pendekatan sektoral serta lebih berperannya masyarakat dan pemerintah di daerah dalam pembangunan (Rustiadi dkk 2011).

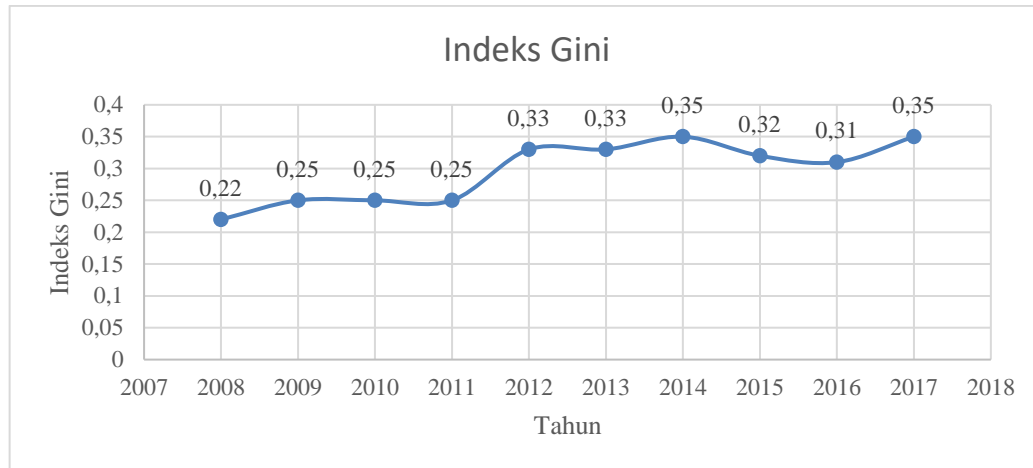
Hubungan antara pemerintah daerah (kota/kabupaten) dengan pemerintah pusat di era otonomi daerah tidak lagi didominasi kerangka hubungan vertikal yang hirarkis, akan tetapi penyelesaian pembangunan lintas wilayah lebih diserahkan pada mekanisme hubungan horizontal. Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, penurunan kesenjangan antara wilayah dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di suatu wilayah. Upaya ini diperlukan karena setiap wilayah memiliki kondisi sosial ekonomi, budaya dan keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga pengembangan wilayah bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Optimal berarti dapat tercapainya tingkat kemakmuran yang sesuai dan selaras dengan aspek sosial budaya dan lingkungan yang berkelanjutan (Riyadi dan Bratakusumah 2005). Pengembangan wilayah adalah salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan suatu wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan kesejahteraan pertumbuhan, serta ketimpangan antar wilayah.

Upaya pengembangan wilayah diarahkan sebagai solusi dari ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah terjadi dikarenakan ketidakmerataan pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut, yaitu dengan mengoptimalkan pusat-pusat pelayanan. Pusat pelayanan merupakan kota-kota yang menyajikan barang dan jasa bagi masyarakat di wilayah sekelilingnya dengan membentuk suatu hirarki berdasarkan jarak dan ambang batas penduduk (Pane 2013). Lebih lanjut dijelaskan pembagian hirarki pelayanan tersebut, mengakibatkan suatu kota

dengan hirarki pelayanan paling tinggi, secara alami memiliki potensi daya tarik dan pengaruh yang besar bagi daerah-daerah yang memiliki kekuatan lebih kecil. Hal tersebut menjadikan kota tersebut mempunyai kemampuan untuk menarik potensi dan sumber daya daerah lain di bawahnya (Muliana dkk 2018).

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten dari 11 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Kota Banjarmasin. Berdasarkan analisis tipologi Klassen Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar berada pada kuadran I, yaitu merupakan daerah maju dan tumbuh pesat (BPS 2017). Pengelompokan pada kuadran I menjadi Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin sebagai wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan memiliki kontribusi yang juga besar selama kurun waktu 2012 sampai dengan tahun 2016.

Pusat pertumbuhan pada kuadran I, yaitu kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar memiliki perbedaan karakteristik yang cukup kontras. Jika Kota Banjarmasin ditopang oleh kegiatan-kegiatan ekonomi sekunder sementara Kabupaten Banjar cenderung ditopang oleh sektor agraris meliputi pertanian dan pertambangan (Bapelitbang Kabupaten Banjar dan BPS 2017). Kondisi tersebut menjadi sangat menarik, yaitu dengan kondisi karakteristik kegiatan yang hanya ditopang sektor agraris (pertanian dan pertambangan) akan tetapi Kabupaten Banjar menjadi bagian dari daerah maju dan tumbuh pesat atau berada pada kuadran I bersama Kota Banjarmasin. Berdasarkan kriteria pada kuadran I, maka Kabupaten Banjar memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 1. Capaian Indeks Gini Kabupaten Banjar Tahun 2007 s.d 2018

Walaupun termasuk dalam kuadran I dan masuk pada klasifikasi ketimpangan sedang, dan juga memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten, akan tetapi capaian indeks gini Kabupaten Banjar belum merata sempurna. Terdapat potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Indeks gini Kabupaten Banjar tahun 2017 sebesar 0,35 yang terus meningkat dari tahun 2008 yang nilainya 0,22. Kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh melambatnya kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalan yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirasa perlu untuk melihat struktur perekonomian Kabupaten Banjar dengan menentukan hirarki wilayah dari 19 kecamatan di Kabupaten Banjar. Penentuan hirarki wilayah diharapkan dapat mengatasi potensi meningkatnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan perencanaan wilayah yang lebih terarah. Perlambatan pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan pembangunan fasilitas pelayanan disetiap kecamatan di Kabupaten Banjar yang berbeda-beda dari segi kualitas dan kuantitas.

Pembangunan fasilitas pelayanan di setiap wilayah merupakan upaya

memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai upaya mendukung pengembangan wilayah. Fasilitas pelayanan tersebut meliputi pelayanan sosial dan ekonomi. Fasilitas pelayanan dari segi kualitas dan kuantitas menurut Dusseldrop erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Setiawan dkk 2016). Fasilitas pelayanan dapat dianggap sebagai faktor potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Fasilitas pelayanan dapat dibedakan dalam dua kelompok menurut fungsinya (Setiawan dkk 2016), yaitu : 1. Pelayanan sosial (berbentuk jaringan dan berbentuk ruang/bangunan) terdapat dalam kegiatan kekeluargaan, pemerintahan, agama, kesehatan, pendidikan, rekreasi, jaminan/bantuan sosial, pertahanan dan keamanan, perhubungan, dan komunikasi, informasi dan data; 2. Pelayanan ekonomi (berbentuk jaringan atau ruang/bangunan) terdapat dalam kegiatan pertanian/perkebunan/kehutanan, industri, konstruksi bangunan, pariwisata dan perhotelan, perdagangan dan perusahaan jasa lain, perhubungan dan komunikasi serta informasi dan data.

Hirarki wilayah merupakan upaya untuk menciptakan pusat-pusat pengembangan wilayah yang lebih efisien. Hirarki wilayah akan

menggambarkan fungsi setiap wilayah sebagai akibat dari perbedaan kualitas dan kuantitas prasarana pelayanan. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu menentukan hirarki wilayah pada 19 kecamatan di Kabupaten Banjar berdasarkan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dimiliki.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, memungkinkan penulis memahami suatu gejala dengan lebih mendalam, yaitu setiap hal yang diteliti dapat diidentifikasi dan dikategorisasikan secara jelas untuk kemudian diukur melalui cara yang tepat (Pendit 2003). Penelitian ini mengidentifikasi hirarki

Indeks Hirarki

$$(I_1) = \sum_k^n (F_{ik} \cdot \frac{n}{ak}) ,$$

dimana : $\frac{n}{ak}$ adalah bobot fasilitas/faktor penentu hirarki.

Metode skalogram digunakan untuk mendapatkan gambaran fasilitas pelayanan di setiap kecamatan berdasarkan indeks hirarki untuk membangun indikator struktur perekonomian suatu wilayah. Gambaran ketersediaan fasilitas pelayanan ditampilkan dengan cara mengurutkan dan juga merangking kecamatan serta fasilitasnya. Asumsi hasil dari metode ini bahwa penduduk mempunyai kecenderungan untuk bergerombol disuatu lokasi dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi yang secara relatif terbaik untuk komunitasnya. Wilayah atau

wilayah di 19 kecamatan dengan metode skalogram dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statitik (BPS).

Penggunaan metode skalogram untuk menentukan hirarki berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi. Fasilitas pelayanan sosial meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan tempat peribadatan. Fasilitas pelayanan ekonomi meliputi industri dan perdagangan dan transpotasi. Seluruh fasilitas pelayanan yang dimiliki oleh setiap unit wilayah dalam hal ini setiap kecamatan didata dan disusun dalam satu tabel. Tabel tersebut merupakan penyederhanaan Skala Guttman, yaitu ketiga tabel dijadikan satu dengan asumsi bahwa masing-masing fasilitas mempunyai bobot dan kualitas yang bersifat *indifferent*.

kecamatan dengan fasilitas pelayanan terlengkap merupakan pusat bagi wilayah sekitarnya. Fasilitas yang ada di seluruh sub wilayah merupakan fasilitas pokok dan fasilitas yang hanya di wilayah tertentu merupakan fasilitas penciri perkotaan. Artinya fasilitas tersebut hanya akan ditemukan di lokasi-lokasi yang secara relatif merupakan lokasi berpusatnya aktifitas masyarakat. Jarak dan waktu tempuh mewakili akses atau kemudahan masyarakat untuk mencapai fasilitas tertentu (Panuju dan Rustiadi 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis skalogram menggunakan data 19 fasiltas pelayanan sosial dan ekonomi pelayanan di setiap kecamatan. Terdapat homogenitas hirarki dari 19 kecamatan yang ada. untuk mendukung pengembangan wilayah melalui penentuan besarnya fungsi:

Tabel 1. Hasil Tabulasi Analisis Skalogram Fasilitas Pelayanan setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Fasilitas	Indeks Hirarki	Hirarki
1.	Aluh-aluh	30.370	16	0,14	III
2.	Beruntung Baru	14.559	15	0,10	III
3.	Gambut	40.736	16	0,17	III

4.	Kertak Hanyar	44.509	17	0,13	III
5.	Tatah Makmur	12.442	16	0,08	III
6.	Sungai Tabuk	63.041	18	0,35	III
7.	Martapura	115.828	19	83,09	I
8.	Martapura Timur	32.115	17	2,84	III
9.	Martapura Barat	18.570	16	0,23	III
10.	Astambul	36.334	18	4,92	III
11.	Karang Intan	34.415	18	0,83	III
12.	Aranio	9.410	14	0,11	III
13.	Sungai Pinang	16.734	16	0,05	III
14.	Paramasan	5.289	5	0,00	III
15.	Pengaron	17.668	16	0,13	III
16.	Sambung Makmur	13.068	17	0,08	III
17.	Mataraman	25.994	19	1,93	III
18.	Simpang Empat	37.000	15	0,18	III
19.	Telaga Bauntung	3.491	10	0,01	III

Sumber: data primer yang diolah

Wilayah dengan hirarki I (pertama) hanya terdapat pada Kecamatan Martapura. Jumlah penduduk Kecamatan Martapura yaitu 115.828 jiwa dengan luas wilayah 42,03 Km² memiliki jumlah fasilitas pelayanan lebih besar yaitu 19 fasilitas pelayanan. Kecamatan Martapura memiliki indeks hirarki tertinggi yaitu 83,09 dengan gap atau jarak yang sangat jauh dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Kondisi tersebut secara hirarki menjadikan Kecamatan Martapura selain sebagai ibukota kabupaten, juga sebagai pusat orientasi pelayanan masyarakat di Kabupaten Banjar.

Hampir seluruh fasilitas pelayanan dimiliki oleh kecamatan dengan hirarki-I, yaitu terutama fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kuantitas fasilitas pelayanan yang dimiliki sangat banyak dibandingkan dengan 18 kecamatan lainnya. Hal tersebut menimbulkan gap atau kesenjangan yang antar kecamatan dengan hirarki-I dengan kecamatan hirarki-III.

Kecamatan Martapura dari jumlah total fasilitas pelayanan yang dinilai, yaitu 20 jenis fasilitas pelayanan, memiliki hampir 100%, yaitu 19 fasilitas pelayanan. Fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut diantaranya, fasilitas

pendidikan, meliputi pendidikan dari pendidikan dasar hingga menengah atas, fasilitas kesehatan, meliputi fasilitas dasar, yaitu puskesmas hingga rumah sakit, fasilitas peribadatan, meliputi musholla hingga masjid, fasilitas ekonomi, meliputi pasar hingga industri, dan fasilitas sarana transportasi meliputi kondisi jalan dan penghubung. Dari semua fasilitas yang dinilai, Kecamatan Martapura hanya kurang dalam fasilitas ekonomi yaitu industri besar.

Wilayah dengan hirarki I atau penyebaran fasilitas pelayanan menggambarkan kemampuan kecamatan tersebut dalam pengembangan wilayah. Hal ini disebabkan semakin besar fungsi pelayanan yang dicapai maka semakin besar orientasi geografis penduduk untuk memperoleh pelayanan, atau semakin besar daya tarik geografis kecamatan terhadap daerah sekitarnya dan semakin besar keterkaitan pelayanan yang terjadi (Setiawan dkk 2016). Kondisi tersebut sesuai dengan asumsi, yaitu data jumlah penduduk di kecamatan dengan hirarki-I sangat besar dibandingkan dengan kecamatan dengan hirarki-III. Persentase penduduk Kecamatan Martapura (hirarki-I), yaitu 20,26% dari 19 kecamatan yang ada.

Kondisi yang sangat berbeda terjadi pada 18 kecamatan lainnya.

Walaupun terdapat beberapa kecamatan dengan fasilitas pelayanan yang lengkap, akan tetapi indeks hirarki yang diperoleh sangat rendah dan jauh tertinggal dibandingkan dengan kecamatan dengan hirarki I. Kondisi tersebut dikarenakan, walaupun terdapat fasilitas layanan, tetapi kuantitas fasilitas pelayanan belum memadai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Kecamatan dengan hirarki III dengan nilai indeks di atas 1 (satu) dan jumlah fasilitas lebih dari 15 fasilitas, yaitu Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, dan Kecamatan Matraman. Ketiga kecamatan tersebut selain memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, juga memiliki jarak yang relatif dekat dengan ibukota kabupaten. Kecamatan Martapura Timur memiliki fasilitas pelayanan yang cukup lengkap, diantaranya fasilitas peribadatan. Sama halnya dengan Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul dan Kecamatan Matraman memiliki fasilitas pelayanan yang cukup lengkap diantaranya fasilitas pendidikan dan peribadatan.

Terdapat 15 kecamatan dengan hirarki III dengan indeks di bawah 1 (satu). Walaupun memiliki fasilitas pelayanan relatif banyak, akan tetapi rata-rata kecamatan tersebut memiliki jarak yang relatif jauh dari ibukota. Bahkan terdapat yang memiliki jarak lebih dari 150 km dari ibukota, yaitu Kecamatan Paramasan. Kecamatan Paramasan memiliki jarak ke ibukota, yaitu 170 km dan merupakan Kecamatan dengan indeks hirarki paling rendah, yaitu 0,00, dengan jumlah fasilitas pelayanan paling sedikit, yaitu hanya memiliki 5 (lima) fasilitas pelayanan. Selain itu Kecamatan Paramasan memiliki jumlah penduduk kedua paling rendah setelah Kecamatan Telaga Banuntung.

Fasilitas pelayanan yang paling minim dimiliki oleh Kecamatan Paramasan, yaitu fasilitas pendidikan dan sarana transportasi. Fasilitas pelayanan pendidikan hanya pendidikan dasar dan menengah dengan jumlah yang sangat sedikit, yaitu hanya ada 9 (sembilan)

sekolah dasar dan 1 (satu) sekolah pendidikan menengah., tidak terdapat sekolah menengah atas. Selain fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi sangat minim.

Kondisi fasilitas pelayanan di Kabupaten Banjar belum tersebar merata di setiap kecamatan yang menjadikan kondisi persebaran penduduk terpusat pada suatu wilayah dengan fasilitas yang relatif lengkap. Jumlah fasilitas pelayanan memiliki kesenjangan yang sangat jauh antara wilayah yang relatif dekat dengan ibukota dengan wilayah yang memiliki jarak yang sangat jauh dari ibukota, khususnya pada fasilitas pelayanan dasar, yaitu pendidikan. Kondisi tersebut perlu dilakukan pemerataan dalam pengembangan wilayah khususnya pemenuhan fasilitas pelayanan dasar.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kecamatan yang memiliki indeks tertinggi atau berfungsi sebagai pusat aktifitas dengan kalsifikasi fasilitas pelayanan social ekonomi terlengkap dibandingkan dengan kecamatan lainnya atau wilayah hirarki I terdapat hanya pada 1 kecamatan saja, yaitu Kecamatan Martapura. Tidak terdapat kecamatan dengan prasarana penunjang pengembangan wilayah kategori sedang atau hirarki II. Kecamatan yang memiliki indeks terendah dengan kalsifikasi penunjang pengembangan wilayah paling sedikit atau wilayah hirarki III yaitu sebanyak 18 kecamatan.

Rekomendasi

Terdapat gap atau kesenjangan yang sangat besar pada kecamatan dengan hirarki I dan hirarki III memberi peluang untuk pemangku kebijakan memprioritaskan pengembangan wilayah pada 18 kecamatan dengan hirarki III. Pemerintah Kabupaten Banjar dapat merencanakan pembangunan fasilitas pelayanan focus pada wilayah hirarki III. Kebijakan berupa pemenuhan fasilitas pelayanan dan meningkatkan jumlah

fasilitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah atau kecamatan. Perencanaan berdasarkan hirarki mengurangi resiko ketimpangan yang terjadi, dimana focus pembangunan hanya pada satu wilayah saja.

Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Kanowe Selatan". Jurnal Ekonomi (JE). Volume 1. Halaman 44-55.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapelitbang Kabupaten Banjar dan BPS. 2017. "Analisis Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Banjar 2012-2016". CV. Karya Bintang Musim.
- Muliana R, Astuti P, Fadli A. 2018. "Kajian Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Kampar". Jurnal Saintis. Volume 18 Nomor 1. Halaman 59-72.
- Pane, Teguh Achmad. 2013. "Kajian Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai". Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Panuju DR dan Rustiadi E. 2012. "Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah". Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB. Bogor Bisnis
- Pendit, Putu Laxman, 2003. "Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Suatu Pengantar Diskusi Epistemologi dan Metodologi". Jakarta: JIP_FSUI.
- Riyadi, dan D Bratakusumah. 2005. "Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah" . Jakarta: PT. Garmedia Utama.
- Rustiadi, E, S Saefulhakim, dan DR Panuju. 2012. "Perencanaan dan Pengembangan Wilayah". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setiawan D, Saenong Z, Matoka U. 2016. "Analisis Fungsi Pelayanan